

## **POLITIK PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN KESADARAN KRITIS DAN JATI DIRI**

Oleh :

**I Gusti Lanang Wiratma**

Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha

### **ABSTRAK**

Persoalan bangsa Indonesia adalah persoalan kita semua sebagai warga negara, apalagi komunitas yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Anak-anak bangsa yang sedang berproses mencari jati diri, perlu diberikan pemahaman dan arah oleh para pendidik sehingga dalam pencarian identitas dan eksistensi dirinya tidak hanya melalui tayangan film di layar kaca. Beberapa informasi, pemberitaan yang menimbulkan kegalauan pada anak bangsa, perlu diluruskan dan dilakukan pengkajian bersama di dalam kelas, sehingga memunculkan kesadaran kritis, dan peningkatan kecerdasan. Dalam upaya mengarahkan anak didik untuk menjadi manusia cerdas, kritis, memiliki jati diri dan humanis, diperlukan politik pendidikan yang memanusiaikan melalui kebijakan pendidikan. Politik pendidikan bisa diupayakan oleh para guru melalui pembelajaran di kelas. Upaya ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila para guru selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan memahami tentang hakikat kemanusiaan. Kebijakan pendidikan yang memungkinkan sebagai "diskursus" bagi para pakar pendidikan adalah perlu adanya pelajaran tentang "Nilai-nilai Kemanusiaan".

**Kata-kata kunci** : politik pendidikan, kesadaran kritis, dan jati diri.

### **1. PENDAHULUAN**

Potret bangsa yang terjadi pada era keterbukaan ini semakin nyata dapat diketahui oleh masyarakat karena setiap kejadian selalu diberitakan oleh media massa, baik elektronik maupun media cetak. Mulai dari persoalan kemiskinan, kejahatan, perkelahian antarpelajar, perkelahian antarmahasiswa, perkelahian antarkampung, konflik desa adat, dan rasa ketidakadilan terutama pada masyarakat bawah, sangat dirasakan oleh masyarakat miskin. Kasus lumpur Sidoarjo yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan, tanpa penyelesaian yang jelas, konflik pihak kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK (Cecak vs Buaya), kasus Bank Century merupakan fenomena lain yang dilihat oleh masyarakat. Dari kasus tersebut dibentuk pansus hak angket di DPR yang dalam sidang proses

penyelidikannya mepertontonkan kegarangan beberapa anggota DPR yang tidak beretika, nyaris berkelahi sampai menimbulkan protes dan marah beberapa kelompok masyarakat. Ketika perayaan hari proklamasi kemerdekaan RI ke 65, dalam kegiatan lomba gerak jalan 45 Km yang diselenggarakan oleh Pemda Buleleng terjadi bentrokan antardesa Kubutambahan dan desa Bondalem, menyebabkan cedera dan ketakutan para peserta gerak jalan, sampai terjadi pembatalan acara lomba (Radar Bali, 16 Agustus 2010). Contoh di atas merupakan peristiwa yang sangat memilukan dan memalukan.

Ketidakpedulian para pemimpin terhadap masalah sosial, ketidakberpihakan kepada kaum miskin, masyarakat kecil, masyarakat tertindas, menjadikan bangsa ini semakin jauh dari cita-cita pendidikan, dan dari cita-cita kemerdekaan. Masyarakat pada umumnya cenderung berpihak pada yang memiliki uang, berpihak pada materi. Para pemimpin, penegak hukum, lembaga pendidikan cenderung berpihak pada uang, materi duniawi, dan pada hal-hal yang sifatnya hedonis. Seperti yang dikemukakan oleh Soedarsono (2008) bahwa kondisi ini berawal dari adanya krisis moneter, ekonomi, politik, hukum kepercayaan, kepemimpinan, dan yang sangat fatal adalah adanya krisis akhlak dan moral, yang mempunyai dampak berkelanjutan. Krisis yang semula merupakan krisis identitas, menjadi lebih dalam karena menyangkut masalah hati nurani yang mencerminkan adanya krisis karakter, terlebih lagi adanya krisis yang berkaitan dengan jati diri.

Akar permasalahan, jika dicermati, justru ada pada faktor manusia, manusia Indonesia. Manusia Indonesia tidak kalah cerdas dengan bangsa lain, tidak begitu bermasalah dengan IQ, tetapi yang menjadi masalah justru yang berkaitan dengan hati nurani, yang mencerminkan karakter dan jati diri. Penampilan manusia Indonesia yang cukup banyak ditemukan adalah sosok yang tidak tulus ikhlas, tidak bersungguh-sungguh, senang yang semu, senang berbasa basi, bahkan sempat melanggengkan budaya ABS (Asal Bapak Senang). Banyak cendekiawan ketika melihat ketidakbenaran, tidak menyuarakan kebenaran, justru berpihak pada ketidakbenaran yang terjadi. Pada zaman tertentu, ada kecenderungan untuk "membebekan" masyarakat, dan akademisi, dalam upaya melanggengkan kekuasaan. Proses "pembebekan" yang sempat terjadi cenderung menghilangkan kesadaran kritis para cendekiawan. Karena ketika si penggembala mengangkat tongkatnya mengarahkan ke sebuah tempat, maka barisan bebek akan mengikuti tanpa berpikir

apakah dibawa ke jurang yang curam, atau ke selokan yang penuh makanan? Kondisi ini dirasakan tanpa kemerdekaan, sementara di lain pihak proses pendidikan bertujuan untuk pembebasan, seperti yang dikemukakan oleh Freire (2007, 2010).

Ketidakkritisian yang dilakoni ini merusak karakter individu, tidak percaya diri, hidup dalam ketakutan dan berimplikasi pada rusaknya karakter bangsa. Dalam kinerja, hal itu ditampilkan dengan sikap-sikap: tidak bisa dipegang kata-katanya, tidak bisa dipegang janjinya, mengelak dari tanggung jawab, saling menyalahkan dan saling menghujat, atau tidak adanya kesatuan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Dalam dunia pendidikan indikasi yang kehilangan karakter dalam diri pendidik, jika membocorkan bahan ujian, memberikan nilai tidak sesuai dengan prestasi siswa, memberikan ijazah dengan tanpa mengikuti proses pendidikan yang seharusnya dilalui sebagai sebuah pembelajaran, dan lain-lain yang menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Sebetulnya masih banyak orang Indonesia yang baik, namun tertutupi oleh orang-orang yang menampilkan perilaku tidak terpuji. Untuk itu maka anak bangsa Indonesia harus mau dan mampu kembali mengenali diri, menemukan kembali jati diri, membangun jati diri, membangun karakter, melalui salah satu cara yang utama di samping cara-cara lain, yaitu melalui politik pendidikan. Melalui tangan-tangan para guru diharapkan terjadi proses pengembangan kesadaran kritis dan pengukiran karakter menuju kesadaran jati diri, mulai anak usia dini sampai anak dewasa, karena *"when character is lost, everything is lost"*. Berdasarkan hal tersebut pembahasan akan diarahkan pada bagaimana mengembangkan kesadaran kritis dan jati diri masyarakat melalui politik pendidikan?

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Pendidikan dan Kesadaran Kritis

Rohman (2009) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat memiliki keinginan untuk maju berkembang menjadi lebih baik. Keinginan tersebut selalu diupayakan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui kegiatan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu cara yang dipilih untuk meraih kemajuan. Misalnya masyarakat Sparta, pada era Yunani Kuno, melalui pendidikan menginginkan agar warga

negaranya memiliki mutu diri berupa” kepribadian satria” sedangkan masyarakat Athena menginginkan warga negaranya memiliki mutu diri berupa”kecerdasan”.

Upaya memajukan masyarakat melalui pendidikan dalam rangka mewujudkan mutu sumber daya anggota masyarakat, agar menjadi sumber daya pembangunan, dapat dicapai dengan sebuah rekayasa politik. Rekayasa politik yang dimaksud adalah penetapan pendekatan, metode, strategi perumusan dan penerapan kebijakan politik yang mengatur secara ketat penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, rekayasa politik dilakukan melalui perumusan dan penerapan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dimaksudkan sebagai keseluruhan keputusan serta perundang-undangan hasil dari proses dan produk politik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.

Pada zaman orde baru, salah satu tujuan pendidikan adalah mendukung pembangunan nasional. Oleh karenanya produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Setelah selesai dari bangku pendidikan mereka masuk ke dalam dunia kerja, siap menjadi kuli yang diperintah oleh atasan atau majikannya tanpa harus melakukan protes apapun. Hasil yang diperoleh, ketika kondisi menjadi demikian, maka pendidikan pun bukan lagi melahirkan para terdidik yang siap mengabdikan kepada bangsa dan negara untuk melakukan perubahan, namun mereka berada di bawah kendali para penguasa, dan elemen lainnya yang memiliki modal besar. Posisi mereka digunakan sebagai penyokong keberlangsungan dan kemajuan usaha para majikannya.

Apa yang diutarakan oleh Yamin (2009) diakui maupun tidak dalam era orde baru, pendidikan telah dimuarakan pada pembangunan ekonomi, maka yang terjadi kemudian adalah produk-produk pendidikan yang tidak memiliki kepekaan sosial yang tinggi, karena yang dikejar dalam dunia pendidikan adalah, setelah mencari ilmu atau mengenyam pendidikan, mereka harus bekerja, mendapatkan uang, dan melangsungkan kehidupannya masing-masing. Jika kemudian diharapkan untuk memikirkan persoalan bangsa, maka itupun sangat mustahil bisa terjadi. Pendidikan bertujuan sangat mulia, yakni untuk melahirkan produk-produk pendidikan yang peduli terhadap persoalan bangsa dan ikut membangun bangsanya dengan lebih baik di masa mendatang. Pendidikan di zaman orde baru secara sengaja maupun tidak sengaja, diarahkan sebagai pekerja, sebab di situ ada kepentingan politis yang sedang dijalankan oleh sebuah rezim tertentu.

Kepentingan politis yang ada adalah politik penumpulan kepekaan sosial dan penumpulan sikap kritis terhadap lingkungan sekitar, sehingga akan menjadikan penguasa lebih mudah untuk menjalankan tujuan-tujuannya, sebab tidak ada yang melakukan protes penolakan, atau kritik terhadap sebuah kebijakan penguasa yang dilahirkan. Semua peserta didik ketika sedang menimba ilmu dan pendidikan, dicekoki ilmu yang hanya menekankan kemampuan kognitif, sedangkan kemampuan afeksi dan psikomotorik yang melatih peserta didik untuk peduli dan perhatian serta kritis terhadap realitas sosial tidak ditanamkan sama sekali.

Menurut paradigma kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap *'the dominant ideology* ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang, agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak bisa bersikap netral, bersikap objektif maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah ”memanusiakan” kembali manusia yang mengalami *dehumanisasi* karena sistem dan struktur yang tidak adil.

Menurut Rahardjo (2010) zaman ini berkembang demikian cepat, bahkan jauh lebih cepat dari perkiraan para ahli. Prediksi para ahli perancang masa depan sering meleset, karena dimensi permasalahan yang dihadapi manusia saat ini demikian kompleks. Satu peristiwa sering bertautan dengan peristiwa lainnya, sehingga tidak ada peristiwa yang berupa *a single event*. Untuk menyelesaikannya diperlukan berbagai pendekatan. Sebut saja, misalnya, peristiwa keagamaan hampir selalu terkait dengan masalah politik, sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.

Dalam keadaan demikian, menjadi orang pintar saja belum cukup. Agar mampu menghadapi persaingan ke depan, dibutuhkan orang yang mampu berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis ialah berpikir dengan konsep yang matang dan mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap tidak tepat dengan cara yang baik.

Menurut para ahli, melatih berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mempertanyakan apa yang dilihat dan didengar. Setelah itu, dilanjutkan dengan bertanya mengapa dan bagaimana tentang hal tersebut. Intinya, jangan langsung menerima mentah-mentah informasi yang masuk. Dari mana pun datangnya, informasi yang diperoleh harus dicerna dengan baik dan cermat sebelum akhirnya disimpulkan. Karena itu, berlatih berpikir kritis artinya juga berperilaku hati-hati dan tidak *grusa-grusu* dalam menyikapi permasalahan. Pernahkah kita merasa tidak nyaman jika melihat sesuatu tidak berjalan dengan baik di sekolah, keluarga, atau lingkungan tempat kerja? Jika itu terjadi, ini kesempatan kita melatih berpikir kritis. Caranya, dengan menanyakan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi dengan diikuti suatu tindakan yang kreatif. Ada pandangan lain untuk meningkatkan sikap kritis. Menurut penelitian para ahli neurolinguistik, cabang ilmu yang mengkaji bahasa dan fungsi saraf, otak manusia bisa dilatih fungsi-fungsinya, termasuk untuk melahirkan sikap kritis. Menurut mereka, otak manusia dibagi dua, yakni otak kiri yang memproduksi bahasa verbal, *imitatif* dan *repetitif*, dan otak kanan yang memproduksi pikiran yang bersifat *imajinatif*, *komprehensif*, dan *kontemplatif*. Muncul dugaan bahwa orang-orang agung para pembuat sejarah besar adalah orang yang memiliki otak kanan yang aktif.

## 2.2 Pendidikan dan Pengembangan Jati Diri

Penampilan seseorang secara utuh dapat digambarkan dengan tiga lapis. Lapisan yang paling luar menunjukkan kepribadian, yang ditampilkan keseharian, berisi identitas dan tempramen. Lapisan kedua adalah karakter, dan lapisan ketiga yang paling dalam adalah jati diri. Pada pengembangannya, jati diri merupakan totalitas penampilan atau kepribadian seseorang yang akan mencerminkan secara utuh pemikiran, sikap, dan perilakunya. Seorang yang berjati diri menampilkan siapa dirinya yang sesungguhnya, dan mampu secara segar dan tegar tampil dengan keadaan yang sebenarnya sebagai sinergi antara jati diri, karakter, dan kepribadian. Orang yang berjati diri akan mampu memadukan antara cipta/olah pikir, karsa/olah karya, dan rasa/olah hati.

Menurut Soedarsono (2008) karakter merupakan nilai-nilai yang terpatriti dalam diri manusia melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan yang dipadukan dengan nilai-nilai dari dalam diri manusia,

menjadi semacam nilai intrinsik yang mewujudkan dalam sistem daya juang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Keterkaitan antara jati diri, karakter, pemikiran dan perilaku sebagai suatu proses, berawal dari jati diri yang merupakan sifat hakiki manusia, yang mengandung sifat-sifat dasar, merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuh kembangkan. Jati diri yang merupakan potensi itu diibaratkan sebagai sebuah batu bahan permata yang belum terbentuk, yang perlu dipotong, diasah, digosok sampai halus untuk dapat memancarkan sebagai permata yang bersinar. Dalam proses pengasahan dan penggosokan inilah peran pendidikan sangat penting.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 No. 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Disebutkan pula dalam pasal di atas, bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, dan kebudayaan nasional Indonesia, serta pendidikan harus tanggap terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, politik pendidikan nasional dimaksudkan sebagai pendekatan atau metode yang didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia guna memengaruhi pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan mampu melahirkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, dengan adanya konsep politik pendidikan yang terarah, meniscayakan adanya kebijakan pendidikan yang mencerahkan dan memberadatkan. Namun, apabila saat ini masih banyak kebijakan pendidikan yang tidak mencerahkan dan justru menjadikan pendidikan sebagai proyek komersialisasi tertentu, ini dikarenakan politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah cenderung lebih memihak kepada golongan tertentu. Tilaar (2009, 2010) menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci dari semua aspek pembangunan manusia. Seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya berkaitan dengan pendidikan. Perubahan sosial hanya bisa terjadi melalui pendidikan.

Meningkatkan kapasitas manusia tidak bisa dilakukan melalui kekuasaan, tetapi melalui pendidikan.

Kebijakan pendidikan di masa yang akan datang perlu melakukan penataan dengan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan bangsa. Pengembangan dan peningkatan kecerdasan yang harus dilakukan adalah peningkatan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual secara seimbang. Sementara itu, dalam kenyataan sekarang, pendidikan lebih menekankan pada kecerdasan intelektual. Jika hal ini dapat dilakukan mulai dari sang pengambil kebijakan sampai pada pelaku pendidikan, niscaya akan menghasilkan anak-anak bangsa yang beradab dan humanis. Proses menuju pengembangan jati diri melalui pendidikan, mesti senantiasa harus melakukan perubahan dalam hal pemerataan pendidikan, jenis lembaga pendidikan, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak sehingga tidak berat bagi anak didik, perubahan jam belajar dan sistem pembelajaran, serta perubahan sistem ujian dan penentuan kelulusan. Sebagai gagasan, mungkin pada setiap jenjang pendidikan dicanangkan pelajaran tentang "Nilai-nilai Kemanusiaan" secara berjenjang. Pembelajaran tentang "Nilai-nilai Kemanusiaan" dapat diberikan dari hal-hal yang mendasar (misalnya tata krama, budi pekerti, tentang kewajiban) sampai hakikat manusia dan filsafat tentang manusia, ketika berada pada jenjang pendidikan tinggi.

### **2.3 Peran Guru dalam Proses Pendidikan**

Guru memiliki peranan penting dalam menjadikan anak didik seorang manusia yang sesungguhnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik dan kompleks, dibekali hakikat kemanusiaan yang terimplementasi sebagai individu yang otonom, namun selalu terdorong untuk hidup bersama dalam kebersamaan. Manusia memiliki kemampuan mencipta, mengenali dan mematuhi norma-norma/ nilai-nilai yang diterima sebagai pedoman hidup bersama. Hakikat kemanusiaan itu adalah 1) hakikat individualitas, 2) hakikat sosialitas, dan 3) hakikat moralitas.

Hakikat individualitas bermakna bahwa setiap manusia sebagai individu memiliki perbedaan di dalam kesamaannya sebagai sesama manusia. Demikian pula bahwa setiap individu memiliki kehendak/kemauan, sikap, etika, keterampilan dan lain-lain dengan jenis dan potensinya tidak pernah sama. Keunikan dari hakikat individualitas dan sosialitas, terletak pada pengimplementasiannya, yakni satu tetapi



dua dan dua tetapi satu, dalam arti semakin kuat individualitas seseorang (kesadarannya pada perbedaannya dengan orang lain), maka semakin terdorong untuk menerima kehadiran orang lain dalam hidup bersama, atau saling berkomunikasi sebagai perwujudan hakikat sosialitasnya. Demikian pula sebaliknya semakin meningkat komunikasi atau interaksi individu dengan individu lain, akan semakin berkembang kesadaran diri atau individualitasnya. Individualitas tidak tertutup pada kehadiran dan kelebihan atau kekurangan orang lain, demikian pula sosialitas tidak mematikan dan tidak menolak individualitas orang lain. Oleh karena itu, sosialitas bukan kolektivisme, yang tidak memberi tempat pada individualitas dan menghendaki individu lebur dalam komunitasnya, tanpa boleh berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Implementasi sosialitas terwujud berupa kehidupan berkelompok atau bermasyarakat, sebagai hidup bersama dalam kebersamaan yang harmonis dan dinamis, karena setiap individu terbuka dalam menerima pengaruh individu yang lain. Sebaliknya individu juga bebas dalam menyampaikan inisiatif, kreativitas dan inovasi yang mungkin diterima atau ditolak oleh individu-individu lain dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan. Keharmonisan hidup bersama dalam berkelompok, berorganisasi, bermasyarakat dapat ditegakkan, karena manusia dibekali hakikat kemanusiaan yang disebut moralitas (mahluk normatif).

Hakikat moralitas berarti manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk mencari nilai-nilai/norma-norma dan mempunyai kemampuan menghormati dan mematuhi. Dengan dan di dalam nilai-nilai/norma-norma itu individu saling berinteraksi sebagai makhluk sosial. Norma-norma itu berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan, perilaku individu dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai perwujudan hakikat individualitas dan sosialitasnya. Nilai-nilai/norma-norma bahkan berfungsi dalam mengendalikan proses berpikir dan sikap individu yang bersifat abstrak di dalam dirinya terhadap kelompok atau masyarakatnya.

Di sisi lain setiap manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan (need) yang bersifat universal, dalam arti sama jenisnya tetapi berbeda dalam cara dan kepuasan memenuhinya. Dalam perbedaan itu terdapat pula sejumlah individu yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga terdorong untuk membentuk kelompok kecil yang disebut kelompok sosial atau organisasi. Kebutuhan manusia yang bersifat universal itu dapat dikelompokkan menjadi : 1) kebutuhan

fisik/biologis, 2) kebutuhan sosial-psikologis, dan 3) kebutuhan rohaniah/spiritual. Kebutuhan yang berbagai jenis itu berbeda intensitasnya pada setiap individu. Pemahaman tentang hakikat kemanusiaan sangat penting disadari oleh para guru sebagai filosofi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran seperti penerapan model-model pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pemecahan masalah, atau pembelajaran dengan pengajuan masalah yang dilakukan dalam nuansa demokratis, sangat mendukung dalam mengembangkan daya pikir kritis siswa.

Suastra (2010) menyatakan bahwa, pembelajaran sains yang akan datang perlu diupayakan agar ada keseimbangan/keharmonisan antara pengetahuan sains itu sendiri dengan penanaman sikap-sikap ilmiah. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya siswa perlu mendapat perhatian serius dalam mengembangkan pendidikan sains di sekolah, karena di dalamnya terpendam sains asli yang dapat berguna bagi kehidupannya. Dengan demikian, pendidikan sains akan betul-betul bermanfaat bagi siswa itu sendiri dan bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pandangan reformasi pendidikan sains dewasa ini yang menekankan pentingnya pendidikan sains bagi upaya meningkatkan tanggung jawab sosial. Pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa, pembelajaran harus sesuai dengan konteks dan lingkungan tempat anak didik itu berada, sehingga materi ajar dirasakan manfaatnya.

Untuk mewujudkan kesadaran kritis, diperlukan paradigma berpikir yang berbasis kemaslahatan manusia. Kerangka pikir postmodern memberikan beberapa contoh pengajuan pertanyaan sebagai kritik terhadap kultur modern sebagai berikut.

1. ***Kebijakan ekologis.*** Bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat manusia dengan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan di atas alam? Bagaimana kita bisa hidup di dalam keterbatasan ekologis dan sumber daya planet ini, sambil menerapkan pengetahuan teknologi untuk mengupayakan suatu ekonomi yang hemat energi? Bagaimana kita dapat membina hubungan yang lebih baik antara perkotaan dan pedesaan? Bagaimana kita bisa menjamin hak-hak spesies makhluk lain yang bukan manusia? Bagaimana kita dapat mempromosikan pertanian yang lestari serta penghormatan terhadap sistem alam yang mempunyai aturannya sendiri?
2. ***Demokrasi akar rumput.*** Bagaimana kita bisa mengembangkan sistem-sistem yang memungkinkan dan mendorong kita untuk mengendalikan semua keputusan yang mempengaruhi hidup kita? Bagaimana kita memastikan bahwa para wakil rakyat sungguh bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka? Bagaimana kita bisa mengembangkan mekanisme perencanaan yang memungkinkan rakyat mengembangkan dan mengimplementasikan pilihan

mereka dalam berbagai kebijakan dan prioritas anggaran? Bagaimana kita dapat mendorong dan membantu agar "lembaga-lembaga perantara" seperti keluarga banjar, rukun warga, lembaga-lembaga swadaya, kelompok etnik, bisa mengambil kembali beberapa fungsinya yang kini dilaksanakan oleh pemerintah ?

3. **Tanggung jawab pribadi dan sosial.** Bagaimana kita bisa memberikan tanggapan terhadap penderitaan manusia dengan cara yang menghormati martabat manusia? Bagaimana kita bisa mendorong orang-orang agar mereka menganut gaya hidup yang mendukung kesehatan mereka sendiri? Bagaimana kita bisa memiliki suatu sistem pendidikan secara efektif mengajarkan kemampuan akademis, kebijakan ekologis, tanggung jawab sosial dan perkembangan pribadi kepada anak-anak kita? Bagaimana kita bisa memecahkan konflik antarpribadi dan antarkelompok tanpa begitu saja membawa masalahnya kepada pengacara dan hakim? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap pengurangan angka kejahatan di lingkungan kita? Bagaimana kita bisa memupuk nilai-nilai kesederhanaan?
4. **Antikekerasan.** Bagaimana kita sebagai suatu masyarakat bisa mengembangkan alternatif-alternatif yang efektif terhadap pola-pola kekerasan yang berlangsung di lingkungan kita, dalam semua tataran, dari keluarga dan jalanan sampai ke bangsa dan dunia? Bagaimana kita bisa menghapuskan persenjataan nuklir dari muka bumi tanpa menjadi naif terhadap itikad pemerintahan lain? Bagaimana caranya agar kita mampu secara konstruktif menggunakan metode-metode anti kekerasan untuk melawan praktik dan kebijakan yang tidak kita setuju, dan dalam proses itu mengurangi suasana polarisasi dan sikap mementingkan diri sendiri yang merupakan bibit-bibit kekerasan itu sendiri?
5. **Desentralisasi.** Bagaimana kita bisa mengembalikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada individu, lembaga-lembaga, komunitas dan wilayah? Bagaimana kita dapat memupuk berkembangnya kultur-kultur yang berbasis wilayah, bukannya suatu monokultur yang dominan? Bagaimana kita bisa mengusahakan suatu masyarakat demokratis yang terdesentralisasi, dimana lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial meletakkan kekuasaan pada skala yang terkecil (paling dekat dengan lingkungan rumah) yang efisien dan praktis? Bagaimana kita bisa merancang ulang, lembaga-lembaga kita sehingga semakin sedikit keputusan yang harus diambil dan semakin sedikit upaya pengelolaan anggaran saat kita bergerak dari tingkatan komunitas ke tingkat nasional? Bagaimana kita bisa mendamaikan kebutuhan komunitas dan regional untuk menentukan diri sendiri dengan kebutuhan akan pengaturan tersentralisasi yang wajar dalam masalah-masalah tertentu.?
6. **Ekonomi yang berbasis komunitas.** Bagaimana kita bisa merancang ulang struktur-struktur kerja kita untuk mendorong kepemilikan oleh para pekerja dan demokrasi di tempat kerja? Bagaimana kita bisa mengembangkan aktivitas dan institusi-institusi ekonomi baru, yang memungkinkan kita menggunakan teknologi mutakhir dengan cara-cara yang manusiawi, membebaskan, ekologis, dan bertanggung jawab serta tanggap terhadap komunitas? Bagaimana kita bisa

menciptakan suatu bentuk keamanan ekonomi mendasar (*basic economic security*) yang terbuka bagi semua? Bagaimana kita bisa bergerak keluar dari pemahaman sempit tentang "etika pekerjaan" ke definisi baru tentang "kerja", "pekerjaan", dan pendapatan" yang mencerminkan ekonomi yang berubah? Bagaimana kita bisa menstruktur ulang pola-pola distribusi pendapatan untuk mencerminkan kekayaan yang dicapai oleh mereka yang berada di luar ekonomi moneter formal: mereka yang bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai orang tua, merawat rumah tangga, taman di rumah, tenaga kerja sukarela di wilayah komunitas, dan sebagainya? Bagaimana kita dapat membatasi ukuran dan pemusatan kekuasaan perusahaan tanpa mengesalkan arti penting efisiensi dan inovasi teknologi?

7. ***Nilai-nilai postpatriarkal.*** Bagaimana kita bisa menggantikan etika kultural yang mementingkan penguasaan dan pengendalian dengan cara-cara berinteraksi yang lebih kooperatif? Bagaimana kita bisa mendorong orang-orang untuk memikirkan orang lain di luar kelompok mereka? Bagaimana kita bisa memupuk hubungan yang saling menghormati, positif, dan bertanggung jawab, yang melintasi batas pemisahan gender dan pemisahan ragam, yang menghargai perasaan di samping pendekatan rasionalistis? Bagaimana kita bisa bergerak dengan sikap, yang selain menghargai tujuan, juga menghargai cara (penghargaan terhadap proses disamping penghargaan terhadap hasil segala upaya kita)? Bagaimana kita bisa belajar untuk menghargai bagian kehidupan batin yang kontemplatif di samping tampilan luarnya?
8. ***Penghargaan terhadap keanekaragaman.*** Bagaimana kita bisa menghargai keanekaragaman kultur, etnik, ras, seks, agama, dan spiritualitas di dalam konteks tanggung jawab pribadi terhadap semua makhluk? Bagaimana kita bisa menemukan kembali ide-ide terbaik negara kita: martabat individu, partisipasi demokratis, serta kebebasan dan keadilan bagi semua?
9. ***Tanggung jawab global.*** Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh membantu kelompok-kelompok akar rumput yang ada di dunia ketiga? Apa yang kita bisa pelajari dari kelompok-kelompok itu? Bagaimana kita bisa membantu negara-negara lain untuk mencapai swasembada dalam hal pangan dan kebutuhannya pokok lainnya? Bagaimana kita bisa memotong anggaran pertahanan, namun tetap memelihara pertahanan yang mencukupi? Bagaimana kita bisa mempromosikan kesepuluh nilai hijau ini dalam menata ulang tatanan dunia? Bagaimana kita bisa membentuk kembali tatanan dunia tanpa menghasilkan bentuk negara-bangsa raksasa lainnya.
10. ***Fokus masa depan.*** Bagaimana caranya mengajak orang-orang dan institusi-institusi untuk berpikir jauh dalam kerangka masa depan, dan tidak hanya dalam kerangka kepentingan diri egoistik jangka pendek? Bagaimana caranya agar kita bisa mendorong manusia untuk mengembangkan visi untuk masa depan dan bergerak dengan lebih efektif? Bagaimana caranya agar kita bisa mempertimbangkan apakah suatu teknologi baru bermanfaat secara sosial, dan

bagaimana kita bisa menggunakan pertimbangan ini untuk membentuk masyarakat kita? Bagaimana kita bisa merangsang pemerintah dan institusi-institusi lain untuk melaksanakan tanggung jawab fiskal? Bagaimana kita bisa mengusahakan agar kualitas kehidupan, bukannya pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas, menjadi titik tolak pemikiran masa depan? (Griffin, 2005 : 59-63)

Sepuluh nilai-nilai hijau yang dikemukakan tersebut di atas, sebagai kritik terhadap spiritualitas modern, menuju spiritualitas postmodern. Semua pemikir modernitas menekankan individualisme sebagai pusatnya. Secara filosofis, individualisme sebenarnya merupakan suatu "penolakan" bahwa diri pribadi manusia secara internal berhubungan dengan hal-hal lain. Pada hakikatnya bahwa setiap individu manusia sangat ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain, dengan lembaga, dengan alam, dengan masa lalunya, atau mungkin dengan sang Pencipta Ilahi. Dalam pandangan Descartes mengungkapkan individualisme, didefinisikan tentang substansi—dimana jiwa manusia menjadi contohnya yang paling utama—yang untuk menjadi dirinya tidak memerlukan apapun selain dirinya sendiri.

Ketika pandangan modern ini bergerak sebagai zaman modern banyak kemajuan yang dapat dicapai, namun harapan untuk mensejahterakan manusia di masa depan terancam dan mengkhawatirkan. Modernitas menyangkut pergeseran besar dari pemahaman diri komunal ke pemahaman individualistik. Dari faham tersebut muncul kapitalisme modern yang menjadikan kekayaan terkumpul pada sekelompok kecil dari komunitas. Sementara pemiskinan terjadi di mana-mana. Dalam anggapannya dimensi tentang alam sebagai yang tidak memiliki perasaan apapun, dualisme memberikan pembenaran ideologis pada dorongan modernitas, untuk mendominasi dan mengeksploitasi alam secara tak terbatas, termasuk semua makhluk hidup lainnya. Dorongan untuk mendominasi, menundukkan, menguasai, dan mengendalikan alam merupakan salah satu ciri spiritualitas modern.

Spiritualitas postmodern beranggapan bahwa hubungan manusia dengan orang lain dan benda-benda lain di alam bersifat internal, esensial dan konstitutif. Seorang individu tidaklah pertama-tama muncul sebagai suatu wujud yang sudah "penuh" (*self-contained*) dan baru kemudian—dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya—berinteraksi secara superfisial dengan makhluk-makhluk lain yang tidak mempengaruhi esensinya. Justru sebaliknya, hubungan seseorang dengan tubuhnya, lingkungan alamnya yang lebih besar, keluarganya, dan kulturnya membentuk atau

bersifat *konstitutif*, terhadap identitas individu itu. Aspek lain spiritualitas post modern adalah organisme, dan memiliki rasa persaudaraan dengan spesies-spesies lain yang dipandang memiliki pengalaman, nilai dan tujuan mereka sendiri, menikmati kegembiraan dalam kebersamaan dan keinginan untuk membiarkan yang lain sebagaimana adanya. Spiritualitas postmodern juga memiliki hubungan yang baru dengan waktu, yaitu dengan masa lalu dan masa depan, sementara pandangan modern lebih menekankan pada masa kini, dan masa depan tidak memiliki hubungan dengan masa kini, karena ketika bertanya tentang masa depan tidak ada jawaban yang rasional. Pandangan modern ini menimbulkan sebagian besar orang, masyarakat, hanya memikirkan kekinian saja dan untuk kepentingan dirinya saja. Pandangan postmodern menekankan paradigma berpikir kebersamaan dan persahabatan dengan alam, dan berpikir tentang masa depan alam, planet bumi beserta kehidupannya. Untuk itu diharapkan ada usaha bersama untuk memanfaatkan kemajuan ipteks di zaman modern dengan basis nilai-nilai luhur tradisional untuk kesejahteraan manusia kini dan manusia masa depan.

Pemahaman tentang filsafat dan hakikat kemanusiaan serta kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa, serta pandangan masa depan, wajib dimiliki oleh guru, karena guru sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Tantangan keprofesionalan seorang guru diharapkan mampu melakukan inovasi-inovasi, kreatif dan peduli terhadap lingkungan, dalam arti lingkungan alam dan lingkungan sosial, atau selalu berusaha meningkatkan kompetensi diri. Empat kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, sebagai indikator dalam pengembangan profesionalisme. Dengan keprofesionalannya, guru diharapkan mampu mengelaborasi pokok bahasan atau materi pelajaran, sehingga menjadikan anak-anak cerdas, kritis, dan memiliki karakter diri, melalui proses belajar yang demokratis.

### 3. PENUTUP

Sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya melakukan refleksi diri secara bersama-sama, atas carut marutnya kondisi di masyarakat sekitar. Hal seperti ini tampak di pelupuk mata, tidak lepas dari peran media massa menginformasikan kepada kita semua. Kejadian yang sangat memprihatinkan, ketika mendengar

pemberitaan tentang perkelahian antarmahasiswa dalam satu perguruan tinggi, perkelahian antarpelajar, perkelahian antaranggota DPR dalam sidang terhormat, kapal patroli laut Indonesia ditembaki oleh kapal Malaysia, dan masalah-masalah lain yang membuat kita menarik nafas panjang.

Dalam upaya meningkatkan rasa kemanusiaan, jati diri, dan rasa kebangsaan, maka peranan pendidikan sangat strategis. Kebijakan pendidikan melalui politik pendidikan yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa, oleh para pendidik, penting untuk diupayakan ke arah itu. Para guru dalam pembelajaran mesti memiliki keberpihakan, misi mengembangkan kesadaran kritis serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa kebangsaan. Hal ini akan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi diri dan keteladanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Freire Paulo. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Griffin David Ray. (2005). *Visi-Visi Postmodern: Spiritualitas dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yamin Moh. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Radar Bali, 16 Agustus 2010. *Panitia Batalan Lomba Gerak Jalan 45 Km*.
- Rahardjo Mudjia H. (2010). [file:///C:/Documents and Settings/Administrator/MyDocuments/berpikirkritis/169-melatih-berpikir-kritis.html](file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/MyDocuments/berpikirkritis/169-melatih-berpikir-kritis.html).
- Rohman Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Soedarsono Soemarno H.(2008). *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Elex media Komputindo Kompas Gramedia.
- Suastra I Wayan. (2010). *Mengembangkan Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran Sains Berbasis Budaya*. Media Komunikasi FIS. Edisi Khusus Pendidikan Ekonomi Vol.9, No.1. Singaraja: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Tilaar H.A.R dan Riant Nugroho. (2009) *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Tilaar H.A.R. (2010). [file:///C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents /berpikir kritis/maestro-prof-dr-har-tilaar-kritis-dalam.html](file:///C:/Documents_and_Settings/Administrator/My_Documents/berpikir%20kritis/maestro-prof-dr-har-tilaar-kritis-dalam.html).

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. BP. Cipta Jaya.